

IMPLEMENTASI PP NO.7 TAHUN 2021 DALAM MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG

**Yola Adikara Permata¹, Dwiki Adi Putra², Isabella³,
Amaliatulwalidain⁴**

^{1),2),3),4)} Ilmu pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri
Email:202061004@student.uigm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine how government policies are implemented in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang City. The research uses a qualitative approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The analysis is based on Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which includes six main indicators: policy standards and objectives, resources, activity implementation and inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, external environment, and implementers' disposition. The findings indicate that the Department of Cooperatives and MSMEs of Palembang City has undertaken various efforts to support MSMEs, including training (technical guidance), outreach, and provision of unsecured capital assistance in collaboration with local banks. Additionally, the department actively organizes exhibitions inside and outside the city to promote MSME products. The implementation of policies is relatively free from political interference and follows a technocratic approach. The department also serves as an intermediary between MSME actors and financial institutions in facilitating business financing. Overall, the implementation of government policy in supporting MSMEs has been relatively effective, although it still faces challenges related to limited resources and funding. To enhance policy effectiveness, three key recommendations are proposed: strengthening training and mentoring, improving access to financing, and building strategic partnerships with the private sector.

Keyword : MSMEs, Policy Implementation, City Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan eksternal, serta sikap atau disposisi pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM, di antaranya melalui pelatihan (BIMTEK), sosialisasi, serta penyediaan bantuan permodalan tanpa agunan bekerja sama dengan BPR dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dinas aktif menyelenggarakan pameran di dalam dan luar kota sebagai strategi pemasaran produk UMKM. Pelaksanaan kebijakan cenderung bebas dari intervensi politik dan dilaksanakan secara teknokratis. Dinas juga berperan sebagai

perantara antara pelaku UMKM dan pihak perbankan dalam pengajuan pembiayaan usaha. Secara umum, implementasi kebijakan dinilai telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap UMKM, direkomendasikan tiga langkah utama, yaitu: penguatan pelatihan dan pendampingan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Kata kunci: *UMKM, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Kota*

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saat ini ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan dan tantangan seiring dengan dinamika global. Pada umumnya, Indonesia memiliki sektor ekonomi yang beragam, melibatkan industri-industri seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Kondisi makro ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan investasi menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja ekonomi negara ini. Upaya untuk meningkatkan daya saing, memperkuat sektor UMKM, dan mendukung inovasi terus menjadi fokus dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Cahyono dkk. 2023).

Ekonomi Indonesia juga terus mengalami dinamika yang signifikan seiring berbagai faktor seperti perubahan kondisi global,

kebijakan pemerintah, dan dampak pandemi COVID-19. Meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat krisis kesehatan global, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021. Pemerintah fokus pada reformasi struktural, peningkatan daya saing, dan diversifikasi ekonomi untuk memitigasi risiko dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sektor ekonomi Indonesia yang beragam, dari pertanian hingga manufaktur dan jasa, memainkan peran penting dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kinerja makroekonomi, termasuk inflasi dan tingkat suku bunga, juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perkembangan teknologi dan kebijakan pro-inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci dalam upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

distribusi pendapatan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks global yang terus berubah, kemampuan adaptasi dan ketangguhan ekonomi Indonesia menjadi faktor kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam menghadapi masa depan (Purwadinata dan Batilmurik t.t.). Sumber daya manusia (SDM), modal, bahan baku, pemasaran, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi/informasi merupakan sebagian dari permasalahan yang dihadapi. Meskipun IMK mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,65 juta orang di tahun 2020. Tetapi kualitas SDM IMK masih relatif rendah. Hal tersebut tercermin dari besarnya persentase (54,52%) pengusaha dan tenaga kerja yang berpendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, sehingga wacana IMK “naik kelas” tertunda oleh sejumlah permasalahan (Siswoyo, 2021: 3-4).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kota Palembang, semakin berkembang pesat dengan adanya sektor Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung distribusi pendapatan (Janianda dkk. 2024). Pemerintah Indonesia telah dengan gigih melaksanakan berbagai program dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mencerminkan komitmen kuat terhadap sektor ini. Inisiatif-inisiatif tersebut melibatkan pemberian bantuan insentif dan pembiayaan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga secara aktif terlibat dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memasarkan produk-produk lokal UMKM.

Sementara itu, upaya digitalisasi pemasaran UMKM turut di implementasikan, menciptakan akses yang lebih luas ke pasar Global. Pandemi Covid-19 telah berdampak yang mendalam dan merata terhadap perekonomian, menciptakan tantangan yang kompleks dan tak terduga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Penurunan ekonomi yang tajam terjadi seiring dengan implementasi langkah-langkah pembatasan sosial, *lockdown* ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penutupan bisnis yang diterapkan untuk meredam penyebaran virus Covid-19. Sektor-sektor inti seperti industri, perdagangan, dan jasa mengalami kontraksi yang signifikan, seiring dengan terhentinya aktivitas ekonomi akibat kebijakan kesehatan masyarakat. Pengaruhnya yang meluas terlihat dari berkurangnya daya beli masyarakat, penurunan investasi, dan dampak serius pada lapangan pekerjaan. Bisnis kecil dan menengah, yang sering kali menjadi inti dari ekonomi lokal, juga terpukul keras oleh situasi ini. Selain itu, ketidakpastian global dan gangguan pada rantai pasokan internasional turut menyulitkan upaya pemulihan ekonomi.

Pemerintah Indonesia merespons krisis ini dengan mengimplementasikan kebijakan stimulus ekonomi, program bantuan sosial, dan langkah-langkah lainnya untuk menjaga stabilitas dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, perjalanan pemulihan

ekonomi tetap dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk varian baru virus dan dinamika ketidakpastian global. Menghadapi kompleksitas situasi ini, penting untuk terus memantau perkembangan, merancang kebijakan yang responsif, dan memastikan kerjasama yang erat antara sektor publik dan sektor swasta. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan upaya bersama, adaptabilitas, dan kebijakan yang cerdas untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang seiring dengan evolusi pandemi COVID-19

Tidak hanya itu, Pemerintah memperkuat potensi wirausaha melalui Alumni Program Kartu Prakerja dengan menyediakan pembiayaan tambahan melalui KUR. Semua langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk meningkatkan daya saing UMKM. Lebih jauh lagi, Pemerintah telah menetapkan UU Cipta Kerja sebagai landasan strategis untuk menaikkan kelas UMKM dalam jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan industri kecil maupun menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian,

dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan perorangan dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha secara mandiri. Tidak termasuk dalam usaha ini cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Undang-Undang tersebut juga menetapkan standar untuk usaha kecil.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha. Usaha ini tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria Usaha Menengah mencakup baik usaha kecil maupun besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. (UMKM 4.0. n.d,2020:27).

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada tiga kriteria dalam UMKM terbagi:

Tabel 1

Kriteria dalam UMKM

No	Kriteria Usaha	Omzet Usaha
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp2 Milyar
2	Usaha Kecil	Rp2 Milyar – Rp15 Milyar
3	Usaha Menengah	Rp15 Milyar – Rp50 Milyar

Sumber : PP No. 7 Tahun, 2021

Berdasarkan Tabel 1 yang ditetapkan oleh PP No. 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah peneliti dapat mengkaji bahwa Usaha Mikro mempunyai Omzet Usaha dengan Maksimal RP. 2 Milyar (dua Milyar rupiah), Usaha Kecil dengan Rp. 2 Milyar – Rp. 15 Milyar (dua milyar rupiah – lima

belas milyar rupiah) dan Usaha Menengah dengan Rp. 15 Milyar – Rp. 50 Milyar (lima belas milyar rupiah).

Kriteria UMKM sesuaikan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

1. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Mikro, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Mikro, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
3. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Menengah, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kota Palembang, sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Selatan, memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Pada era globalisasi dan teknologi informasi seperti saat ini, UMKM di Kota Palembang dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Transformasi digital, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan global mendorong UMKM untuk terus beradaptasi agar tetap hidup dan berkembang. Oleh karena itu, penelitian tentang UMKM di Kota Palembang menjadi sangat relevan dan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Salah satu pusat perkembangan ekonomi di Pulau Sumatra bagian Selatan ialah Kota Palembang, memainkan peran penting dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Dinamika Dinas Koperasi dan UMKM. Sejak mengambil alih peran yang strategis, Dinas ini telah menjadi tulang punggung bagi pengembangan

UMKM di kota tersebut. Melalui berbagai program inovatif, Dinas Koperasi dan UMKM Palembang telah berhasil memberikan dorongan positif bagi pelaku usaha kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Salah satu inisiatif yang mencolok adalah penerapan program pembiayaan yang mendukung UMKM, termasuk skema kredit yang terjangkau dan aksesibilitas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, para pengusaha kecil di Palembang dapat mengakses modal yang diperlukan untuk meningkatkan produksi, diversifikasi produk, dan memperluas jangkauan pasar.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Palembang aktif mengorganisir pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaku usaha. Salah satu fokus dalam pemasaran UMKM adalah digitalisasi, yang membantu mereka menghadapi era globalisasi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional

Pemerintah kota ini juga berupaya menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, Palembang terus berusaha menjadi tempat yang ramah bagi inovasi dan perkembangan usaha kecil, berkontribusi secara signifikan pada ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

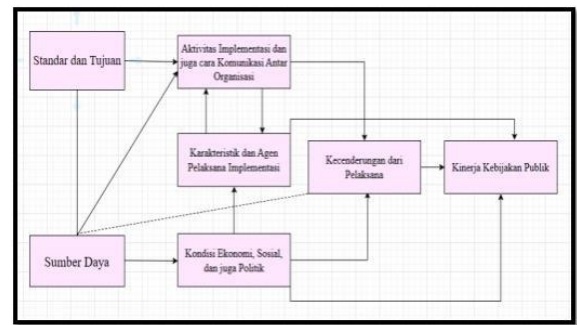
Bersumber pada yang sudah dijelaskan tersebut peneliti membuat rumusan masalah adalah bagaimana implementasi dari PP No. 7 Tahun 2021 dalam mendukung Usaha Kecil di Kota Palembang?

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Teori Van Meter dan Van Horn dalam buku “Model-model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan” yang dikutip oleh Reno Affrian (2023), menyatakan bahwa Implementasi merupakan sebuah mengembangkan

pendekatan yang disebut dengan *Model of the policy implementation* atau bahasa Indonesia menjadi Model pendekatan *top-down* diproseskan Implementasi dipandang sebagai suatu abstraksi dari sebuah implementasi kebijakan dengan tujuan agar mencapai kinerja Implementasi kebijakan publik tinggi dan variabel. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan bagi Koperasi dan UMKM agar mereka dapat lebih berkembang, bersaing, dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Dengan PP No. 7 tahun 2021 ini pemerintahan memberikan kemudahan dalam koperasi dan UMKM, melindungi bagi koperasi dan UMKM, pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan, bimbingan teknis, serta penyediaan akses pembiayaan dengan kemudahan pemakaian skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemerintahan mendorong modernisasi koperasi agar bersaing di era digital.



Sumber: Van Meter and Van Horn

Gambar 1. Model Analisis Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn, pendekatan *top-down* yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn disebut Model Proses Implementasi Kebijakan. Proses implementasi merupakan hasil langkah nyata dari penerapan suatu kebijakan yang sengaja dijalankan untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Proses ini juga bersifat berkelanjutan dan mempertimbangkan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki arah linier terhadap penerapan keputusan kebijakan, serta pada kebijakan dan tindakan publik yang ada. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang memiliki pengaruh

terhadap pelaksanaan pemerintahan tersebut (Sasuwuk, Lengkong, and Palar 2021),

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Jika standar kebijakan atau tujuan kebijakan ruang lingkup dan tujuan kebijakan benar-benar realistis secara sosial-budaya pada tingkat implementasi kebijakan, efektivitas implementasi kebijakan dapat diukur dengan keberhasilan, di tingkat warga negara. Dalam praktiknya, sangat sulit untuk meningkatkan kebijakan ke tingkat yang dianggap berhasil, jika standar atau ukuran dan tujuan kebijakan tidak jelas.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses penegakan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memobilisasi sumber daya yang tersedia. Faktor terpenting bagi keberhasilan proses implementasi adalah peran laki-laki. Pada berbagai tahapan dalam proses implementasi, sumber daya manusia yang ada harus memenuhi kebutuhan kerja yang dibutuhkan oleh mandat

(kewenangan) non-politik. Tetapi, jika sumber daya ini kekurangan keahlian dan kapasitas, sangat sulit untuk mengharapakan kebijakan nasional menjadi efektif. Namun selain sumber daya lain yang perlu diperhatikan yaitu dana dan waktu. Karena suka atau tidak suka, ketika ada pegawai yang berkualitas dan kompeten, meskipun ada kekurangan uang melalui anggaran, sangat sulit untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh kebijakan publik. Sama dengan sumber waktu. Jika sumber daya manusia aktif dan pengeluaran terus berjalan, tetapi waktu hampir habis, ini juga bisa menjadi bagian dari kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sarana mencari dan yang dimaksud Van Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sarana tersebut.

3. Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi Koordinasi

adalah metode yang efektif pada praktik kebijakan publik. Komunikasi juga berperan penting menjadi pondasi utama untuk menjembatani informasi antar

pihak ke pihak lainnya dan juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pihak tersebut. Koordinasi yang baik memungkinkan penyelarasan antara berbagai kebijakan sektor, sehingga pesan yang disampaikan oleh pihak bersifat konsisten dan terkoordinasi. Selain itu, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pihak untuk mendengar umpan balik dari pihak lain, menciptakan siklus umpan balik yang konstruktif dan memperkuat hubungan antar pihak. Oleh karena itu, upaya bersama dalam mengkoordinasikan kebijakan publik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang transparan, inklusif, dan mendukung komunikasi yang baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Ketertarikan manajemen difokuskan Pada organisasi resmi dan tidak resmi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya yang sesuai dan cocok bagi lembaga pelaksana. Misalnya, jika tujuan kebijakan pemerintah adalah mengubah perilaku diterapkan masyarakat atau perilaku yang

bersifat radikal, promotor proyek harus bercirikan memiliki aturan hukum dan sanksi yang kuat. Pada saat yang bersamaan, jika suatu kebijakan pemerintah tidak secara signifikan mengubah perilaku dasar masyarakat, lembaga eksekutif mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan begitu giat dan pembentukannya tidak sesuai dengan citra aslinya. Ruang lingkup dan bidang implementasi kebijakan juga harus dipertimbangkan ketika memilih lembaga pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, semakin banyak pemangku kepentingan yang turut dibawa.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika menilai efektivitas implementasi publik. Pada sudut pandang Van Metter dan Van Horn adalah ruang lingkup Kawasan luar (*eksternal*). Yang terlibat mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang diberlakukan (Tachjan, 2006).

6. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*)

Sikap penerimaan atau penolakan aparat penegak (*agent*) sangat memengaruhi keberhasilan

penegakan ketertiban umum. Ini mungkin karena kebijakan yang diterapkan bukan hasil dari anggota masyarakat setempat yang benar-benar memahami permasalahan dan persoalan yang mereka alami. Namun, implementasi dari atas *top-down* (*bottom-up*) dari kebijakan ini memungkinkan politisi untuk mengatasi kebutuhan, keinginan atau masalah warga negara yang diinginkan, tidak pernah tahu (bahkan tidak bisa menyentuh).

Konsep UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi di berbagai negara karena peranannya yang krusial dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian dan sosial negara terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. UMKM berfungsi sebagai sumber utama penyerapan tenaga kerja di sektor informal, di

mana banyak individu dan keluarga mengandalkan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks pemerataan pendapatan, terutama di daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang, di mana peluang kerja formal sering kali terbatas.

Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah pusat dan daerah telah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program yang dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor ini. Kebijakan ini meliputi penyediaan akses yang lebih baik ke pembiayaan melalui kredit mikro, pelatihan keterampilan manajerial, serta program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melibatkan pengurangan hambatan regulasi, pemberian insentif pajak, dan dukungan dalam pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasional UMKM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan,

berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal. pasar, usaha kecil umumnya menggunakan teknologi sederhana dan melayani pasar lokal dengan jangkauan yang terbatas. Fokus inovasinya cenderung incremental, bukan disruptif, menyesuaikan dengan kapasitas bisnis. Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dalam penelitian, penting bagi peneliti untuk merumuskan definisi konsep yang tepat, sehingga batasan operasional usaha kecil dapat diukur dengan jelas dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

Usaha kecil memiliki peran krusial dalam penelitian ekonomi, terutama dalam memahami terminologi dan karakteristik khusus yang menggambarkan sektor ini. Dalam penelitian, usaha kecil diidentifikasi sebagai entitas bisnis dengan skala terbatas baik dari segi modal, sumber daya, maupun tenaga kerja. Skala ini biasanya mencakup bisnis yang dikelola langsung oleh pemilik, dengan modal yang sering kali berasal dari sumber pribadi atau lembaga keuangan mikro. Jumlah tenaga kerja yang terbatas mencerminkan kapasitas operasional

dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Aspek pengelolaan yang sederhana dan informal juga menjadi ciri khas usaha kecil, di mana keputusan bisnis sering kali diambil secara langsung oleh pemilik. Dari sisi teknologi dan

C. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode kualitatif dengan data pendekatan deskriptif. Artinya, dengan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti bukan berupa analisis dalam bentuk angka statistik numerik melainkan data-data tersebut berasal dari proses wawancara, catatan lapangan, dan arsip dokumen resmi lainnya. Seperti yang dikutip oleh (Attride-Stirling 2016), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguraikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan hipotesis masyarakat secara individu dan kelompok. Penjelasan ganda digunakan untuk mengidentifikasi prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat induktif, memungkinkan peneliti

memunculkan pertanyaan dari data dan memberikan ruang untuk interpretasi. Data dikumpulkan yang dilakukan melalui observasi yang cermat, termasuk deskripsi kontekstual secara rinci, disertai catatan wawancara mendalam dan analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mempunyai dua tujuan utama. Pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and to explore*), dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung UMKM di Kota Palembang

Pelaksanaan kebijakan publik dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, telah mengambil sejumlah langkah untuk mendorong peningkatan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan teori

implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan eksternal, serta sikap atau disposisi para pelaksana. Keenam indikator ini menjadi landasan analisis dalam memahami dinamika dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan kejelasan tujuan kebijakan sangat memengaruhi arah pelaksanaan program di lapangan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah menetapkan sejumlah tujuan utama dalam mendukung UMKM, seperti peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses modal, serta perluasan pasar. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai program seperti pelatihan teknis dan manajerial (BIMTEK), sosialisasi regulasi dan kebijakan, pemberdayaan kelompok usaha, serta penyediaan dukungan berupa bantuan peralatan atau barang produksi.

Dalam praktiknya, tujuan ini sudah cukup jelas dan terarah, namun realisasi di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal penyesuaian program dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM. Misalnya, tidak semua pelaku UMKM membutuhkan pelatihan teknis, sebagian lebih membutuhkan pendampingan manajerial atau akses pemasaran digital. Oleh karena itu, ke depan perlu ada penyusunan program yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan (need-based programs) agar capaian kebijakan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga sumber daya manusia, waktu, dan informasi. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah menjalin kerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) untuk memberikan akses pinjaman modal tanpa agunan hingga maksimal Rp3 juta, sedangkan kerja sama dengan bank lain memungkinkan akses hingga Rp250 juta. Namun, kenyataannya jumlah dana yang tersedia masih terbatas

dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang membutuhkan.

Di samping itu, jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana juga menjadi tantangan. Kurangnya petugas yang memahami dinamika UMKM secara menyeluruh berdampak pada rendahnya efektivitas dalam proses pendampingan. Belum semua pegawai memiliki keahlian teknis maupun soft skill yang memadai untuk menjalankan peran sebagai fasilitator pemberdayaan. Keterbatasan ini membuat proses pelaksanaan program sering terhambat secara teknis dan administratif.

3. Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Ciri khas dari pelaksana kebijakan yang efektif adalah kemampuannya beradaptasi, bersikap proaktif, dan memiliki komitmen terhadap keberhasilan kebijakan. Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan peran aktif dalam mendukung UMKM dengan mengadakan berbagai pameran produk lokal, baik di dalam maupun luar Kota Palembang. Kegiatan ini menjadi salah satu strategi memperluas pasar dan memperkenalkan produk lokal ke khalayak yang lebih luas.

Namun, tantangan tetap ada. Tidak semua pelaksana di dinas memahami pentingnya pendekatan partisipatif dan bottom-up. Beberapa kegiatan masih dilaksanakan dengan pendekatan administratif yang terlalu kaku dan birokratis. Untuk itu, perlu ada pelatihan internal yang menanamkan nilai-nilai pelayanan publik berbasis etika profesionalisme, empati, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Komunikasi dan Koordinasi Antar Organisasi

Komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan, baik internal maupun eksternal, sangat penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program. Dinas Koperasi dan UMKM telah menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perbankan, perguruan tinggi, asosiasi pelaku usaha, serta sektor swasta. Komunikasi ini mendukung kelancaran program, mulai dari penyusunan rencana, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Namun, masih terdapat hambatan komunikasi yang bersifat teknis dan prosedural. Sebagian pelaku UMKM menyampaikan

bahwa proses pengajuan bantuan atau perizinan usaha masih terkesan rumit dan memerlukan waktu yang lama. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal, seperti antara dinas teknis dan perizinan, turut memperlambat proses. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antar lembaga, serta pelatihan komunikasi publik bagi aparatur.

5. Lingkungan Eksternal: Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Secara politik, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang relatif bebas dari tekanan politik praktis dan lebih fokus pada urusan teknis pemerintahan. Stabilitas politik ini menjadi modal positif dalam mendukung kontinuitas program-program pemberdayaan.

Secara sosial, masyarakat Kota Palembang menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang baik dalam kegiatan UMKM, meskipun sebagian masih bersifat individual dan belum membentuk jaringan kolaboratif. Di sisi ekonomi, tantangan datang dari daya beli

masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, serta kompetisi pasar yang semakin terbuka. Faktor-faktor eksternal ini harus terus dimitigasi dengan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi makro.

6. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Sikap atau disposisi pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM bersikap terbuka dan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani pelaku UMKM dengan lembaga keuangan. Misalnya, dalam program SPAP (Skema Pembiayaan Alternatif Produktif), pelaku UMKM cukup melengkapi data administratif, sedangkan proses verifikasi dan evaluasi dilakukan oleh pihak bank. Sikap kooperatif dan partisipatif dari dinas mencerminkan komitmen terhadap pemberdayaan UMKM.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, dan pendampingan pasca bantuan. Pelaksana di lapangan perlu dibekali keterampilan interpersonal dan pemahaman kontekstual terhadap

kondisi UMKM, agar dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam mendukung UMKM telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dinas Koperasi dan UMKM telah berupaya menjalankan fungsinya secara aktif melalui pelatihan, sosialisasi, fasilitasi permodalan, dan promosi usaha. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat tergantung pada tiga hal utama:

1. Penguatan Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Kebutuhan, agar pelaku UMKM benar-benar memiliki keterampilan yang relevan dan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.
2. Penguatan Akses Permodalan yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan menjalin kerja sama yang lebih luas dengan perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.

3. Pembentukan Kemitraan Strategis dengan Sektor Swasta, untuk membuka peluang pasar, transfer pengetahuan, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Transformasi birokrasi ke arah yang lebih rasional, egaliter, dan profesional juga menjadi prasyarat penting. Pemerintah Kota Palembang perlu berinvestasi tidak hanya dalam teknologi dan fasilitas, tetapi juga dalam membangun budaya organisasi yang melayani, proaktif, dan berbasis hasil (result-based governance). Dengan pendekatan yang kolaboratif dan inovatif, UMKM dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang, dapat disimpulkan

bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan telah berjalan **cukup efektif** dan menunjukkan arah yang positif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan operasional.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan dengan cukup baik melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan, sosialisasi, fasilitasi permodalan, dan promosi usaha. Implementasi kebijakan yang dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa:

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan** telah dirumuskan dengan jelas, berfokus pada penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu mandiri dan berdaya saing.
2. **Sumber Daya** yang tersedia, khususnya dana dan SDM, masih terbatas, sehingga membatasi jangkauan dan intensitas pelaksanaan program.
3. **Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antarorganisasi** telah dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, meskipun

koordinasi teknis dan administrasi masih perlu ditingkatkan.

4. **Karakteristik Pelaksana** **Saran**

menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan UMKM, namun perlu penguatan kompetensi aparatur agar lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan.

5. **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik** relatif kondusif, meskipun dinamika ekonomi makro tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang responsif.

6. **Disposisi atau Sikap Pelaksana** menunjukkan peran yang positif dan proaktif, terutama dalam menjembatani pelaku UMKM dengan lembaga keuangan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM di Kota Palembang telah memberikan dampak yang cukup nyata dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ke depan, diperlukan penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, dan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, inovatif, dan berbasis

kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palembang, menyarankan:

- a. Penguatan Pelatihan dan Pendampingan: UMKM perlu mendapatkan akses lebih besar terhadap program pelatihan dan pendampingan yang berkualitas, termasuk pelatihan manajerial, pemasaran, dan pengembangan produk agar mereka mampu bersaing lebih baik di pasar.
- b. Penguatan Akses Pembiayaan: Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan, termasuk memperluas jaringan lembaga keuangan mikro dan menengah serta menyediakan program kredit dengan bunga rendah atau tanpa agunan bagi UMKM.
- c. Pembentukan Kemitraan dengan Sektor Swasta: Pemerintah perlu mendorong kerjasama antara UMKM

dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Ini dapat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses mereka terhadap teknologi dan sumber daya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Attride-Stirling, Jennifer. (2016). *Qualitative Research Qualitative Research*. *Innova Research Journal* 1(2): 1–9.
- Aulia, Nafisatul et al. (2021). “*Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan.*” *Berajah Journal* 2(1): 177–87.
- Cahyono, Dimas Nur, Kristina Putri, Izza Afkarina, Puput Aprilia, dan Sunniyyah Jember. (2023). “*Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19.*” 12(1): 59–75.
- Djoko Sumianto (2020). *Kewirausahaan (sebuah konsep dasar pemahaman dan teknik pengembangannya*. Media Nusa Creative. Bandung.
- Fajar N. D, Mukti. (2015). *UMKM Dan Globalisasi Ekonomi*. LP3M UMY Yogyakarta: 229.
- Gst. B Ngr. P. Putra, dkk (2020). *Kewirausahaan*. 2021. Nilacakra. Bandung
- Janianda, M, M Syah Albaris, Syahira Kesya Nafisa, Dini Rosa Agustina, dan Nayla Syifa Nada. (2024). “*Peran Usaha-Usaha Kecil Di Palembang Terhadap Perekonomian Nasional Provinsi Sumatera Selatan Indonesia yang mempunyai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya . Menuru.*” 2(1): 118–32.
- John Friadi, dkk (2022). *Kewirausahaan berbasis produk*. Samudera Biru. Yogyakarta.
- Hernikawati, Dewi. (2022). “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Kota Palembang.*” *Komunikasi Massa* 3(1): 9–17.
- Imron. (2022). “*Kota Palembang.*” : 1–443.
- Joko Pramono (2020). *Implementasi dan Evaluasi kebijakan publik*. Unsri Press. Surakarta.
- Pintakami, Lintar Brilliant et al. (2023). “*Upaya Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Covid-19 Melalui Perijinan P-IRT Di Kelurahan Dandong.*” *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 4(1): 33–38.

- Putranto, muhammad noval. (2020). *Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja Logistics*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: 5
- Siswoyo, Bambang. (2021). *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* 22(2).
- Suci, Aulia Rahmini. (2008). *Penguatan Umkm*. Upp.Ac.Id 6(1): 1–31.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). *Pemaparan Tentang Konsep*. Suparyanto dan Rosad (2015 5(3): 248–53.
- Syahrudin (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi kasus*. 2018. Nusa Media. Bandung.
- Tarmizi, dkk (2023). *Buku Ajar Kewirausahaan*. 2023. UPPM Universitas Malahayati